



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 002/06012009
HARI : SELASA
TANGGAL : 6 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI desak lagi DK PBB buat resolusi Gaza	3
	Indonesia Jajaki Peluang Penyelenggaraan Sidang Darurat MU PBB	3
	Diplomats seek truce as Gaza's civilian toll rises	4
	Singapore appoints envoy to ASEAN	6
	GAM dan RI Lakukan Pertemuan di Finlandia	6
	SBY: Israel-Palestina Bukan Konflik Agama	6
	Bantuan Kemanusiaan RI Disalurkan Melalui Yordania	7
	Mesir Berupaya Fasilitasi Bantuan Indonesia masuk Gaza	7
	Reputasi Mahmoud Abbas Dipertaruhkan di Dewan Keamanan	8
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Presiden Tak Intervensi Kasus Muchdi	9
	B. EKONOMI	
	President Yudhoyono calls for cooking oil and meat prices cut	10
	Presiden belum puas soal anggaran	10
	President says no need for investors to worry about security	11
	Indonesia Belum Miliki Master Plan Pembangunan Nasional	11

		BBM Langka, Presiden Tegur Pertamina	11
	C.	SOSBUD	
		Wisatawan Australia ke Bali Meningkat 56, 80 Persen	12
		Kebijakan Soal Keagamaan masih Lemah	13
		Sosialisasi Jam Masuk Kerja Mulai Pekan Ini	14
	D.	HANKAM	
		Presiden Ingatkan Pertimbangan Keselamatan Sebelum ke Palestina	14
	E.	HUKUM	
		Public courts toothless in graft fight, say watchdogs	15
		ICW Kembali Datangi KPK, Terkait DAU	16
	F.	OLAHRAGA: Tidak Ada	
	G.	LINGKUNGAN HIDUP: Tidak Ada	
	III.	ARTIKEL	
		Presiden, Krisis Global dan Tempat Hiburan Oleh Diah Novianti	16
		Letter: Indonesian embassy in Dili clarifies by Nelson Simorangkir	18
		Soal Kapal-kapal Eks Jerman (Timur) Itu Oleh Wirasmo Wiroto	18
		Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel? Oleh Mohamad Nabil	20
	IV.	LAIN-LAIN: Wawancara	
		Bantarto Bandoro: Sikap AS Lahirkan Radikalisme Baru Penulis: Mario Aristo	21
	V.	EDITORIAL	
		Editorial: Respecting people's choices	22
		Anggota DPR Tetap Merawat Kemalasan	24

Jakarta, 6 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL

:

1. RI desak lagi DK PBB buat resolusi Gaza

Pemerintah RI kembali mendesak DK PBB agar secepat mungkin mengeluarkan resolusi yang memerintahkan gencatan senjata di jalur Gaza.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia berharap Israel dapat betul-betul menghentikan serangan militer dan penghentian keadaan permusuhan di wilayah tersebut.

"Langkah diplomatik akan terus ditempuh Indonesia. Saya juga terus berkomunikasi dengan dubes RI di New York, saudara Marty Natalegawa," ujar Presiden SBY sore ini sesuai menerima dubes Palestina untuk RI Faridz Mehdawi di kantor presiden.

Menurut Presiden, kalau mekanisme DK PBB tidak dapat ditempuh, dalam situasi kritis seperti saat ini maka ada mekanisme lain yang dapat ditempuh, yaitu Sidang Darurat Majelis Umum PBB.

Jika gencatan senjata di Jalur Gaza akhirnya berhasil direalisasikan dan masyarakat internasional menyetujui pembentukan tim monitoring, Indonesia menawarkan diri untuk menjadi bagian dari tim tersebut.

Di sisi lain, Indonesia akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. "Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah Mesir dan Yordania agar bantuan obat-obatan kita bisa sampai tepat pada sasarannya."

Indonesia juga memutuskan untuk mengirimkan tim dokter dan paramedis di wilayah Mesir yang menjadi tempat evakuasi dari warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. (Bisnis Indonesia)

2. Indonesia Jajaki Peluang Penyelenggaraan Sidang Darurat MU PBB

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa tidak tertutup peluang Indonesia dengan negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengusulkan penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB.

"Hal itu dilakukan karena seperti kita tahu DK PBB kembali gagal menyetujui sebuah pernyataan yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza," kata Menlu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1) malam, usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Dubes Palestina untuk Indonesia.

Menurut Menlu jumlah negara yang menjadi anggota GNB dan OKI telah mencukupi syarat untuk penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum.

Sekalipun keputusan sidang Majelis Umum tidak mengikat sebagaimana resolusi DK PBB, kata Menlu, tapi mengingat kegagalan DK PBB mencapai kesepakatan sudah waktunya Majelis Umum melakukan sesuatu untuk memberikan tekanan moral pada pihak-pihak yang menghindar bertanggung jawab.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia akan membantu Palestina baik melalui diplomasi maupun bantuan kemanusiaan.

Indonesia juga berjanji akan mengirimkan putra-putri terbaiknya sebagai bagian tim pemantau apabila tercapai kesepakatan gencatan senjata.

Sementara itu Presiden Yudhoyono menerima Dubes Palestina untuk mendengarkan mengenai kondisi terakhir di Jalur Gaza dan mencari tahu kebutuhan utama rakyat Palestina saat ini.

Seusai pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang satu jam itu Dubes Palestina saat ditanya mengenai kegiatan sejumlah organisasi di Indonesia yang berniat mengumpulkan massa ke Palestina mengatakan bahwa hal itu meningkatkan moral warga Palestina bahwa masih banyak orang yang berpihak pada mereka.

Ia mengatakan bahwa sekalipun ia mengapresiasi keinginan itu namun pintu perbatasan menuju ke Jalur Gaza saat ini sangat tidak aman.

Mehdevi juga mengatakan bahwa kedua belah pihak perlu kembali melakukan perundingan untuk mencari solusi dari konflik. (Jurnal Nasional)

3. Diplomats seek truce as Gaza's civilian toll rises

Israel's expanding ground and air offensive against Gaza's Hamas rulers took a heavy civilian toll Monday, including three young brothers reported killed by a crashing shell and wounded who filled hospital corridors.

Diplomats and European leaders raced around the region in search of a cease-fire, but with Palestinian rocket fire continuing, Israel said it won't stop its crippling 10-day assault until "peace and tranquility" are achieved in southern Israeli towns in the line of fire.

The operation's ground phase, which began Saturday with a withering round of artillery fire, was going according to plan, military spokesman Brig. Gen. Avi Benayahu told Israeli TV. Israeli forces were sweeping through Palestinian rocket launching locations near the border and the militants were suffering many casualties, he said.

But no militant casualties were seen Monday by an Associated Press reporter at Shifa Hospital, the Gaza Strip's largest. Instead, the hospital was overwhelmed with civilians. Bodies were two to a morgue drawer, and the wounded were being treated in hallways because beds were full.

Gaza health officials reported more than 550 Palestinian dead and about 2,500 wounded since Israel began the campaign 10 days ago, including 200 civilians. U.N. humanitarian chief John Holmes told reporters in New York on Monday that U.N. officials believe at least 500 people have been killed in the fighting and that as many as 25 percent are civilians.

At least 20 Palestinian children were killed during the day, said Dr. Moaiya Hassanain, a health official. Most confirmed deaths have been civilians.

The three young brothers from the Samouni family died in an attack on a town outside Gaza City, a Gaza health official said.

Five Israelis have been killed during the offensive, including a soldier in the ground operation. Heavy Israeli casualties could undermine what has so far been overwhelming public support for the operation.

The three brothers, reportedly were killed in an artillery strike Monday, were carried to a cemetery in an emotional funeral. One of them, Issa Samouni, 3, was wrapped in a white cloth, showing only his pale, yellow face. A man delicately placed him in a dark grave cut into the earth. In one of the first major gunbattles of the ground campaign, Israeli troops and Hamas militants clashed at close quarters on the outskirts of the crowded Gaza City neighborhood of Shajaiyeh, Israeli defense officials said.

Troops seized control of three six-story buildings on the outskirts, climbing to rooftop gun and observation positions. Residents were locked in their rooms and soldiers took away their cell phones, a neighbor said, quoting a relative who called before his phone was seized.

"The army is there, firing in all directions," said Mohammed Salmal, a 29-year-old truck driver. "All we can do is take clothes to each other to keep ourselves warm and pray to God that if we die, someone will find our bodies under the rubble."

Fighter jets attacked houses, weapons storage sites, a pair of mosques and smuggling tunnels, as they have since the start of the offensive Dec. 27. Israel has attacked several mosques during the campaign, saying they were used to store weapons.

In another strategic move, Israeli forces seized a main highway in Gaza, slicing the territory in two.

Details also emerged of an attempt by Hamas fighters to capture Israeli soldiers hours after the ground operation began. As infantrymen advanced up a strategic hill before dawn

Sunday, militants emerged from a tunnel and tried to drag two Israeli infantrymen inside, according to Israeli defense officials.

The Israelis fought off the attempt, but one soldier was killed in an ensuing firefight. The officials spoke on condition of anonymity because the incident had not been made public. Hamas already holds one Israeli soldier, captured in June 2006, and another would be an important bargaining chip.

Israeli forces detained 80 Palestinians — some of them suspected Hamas members — and transferred several to Israel for questioning, said military officials, speaking on condition of anonymity because they were not allowed to release the information.

The Gaza City area was rocked by shelling from both sides as gunboats in the sea and artillery and tanks closing in from the east unloaded thunderous fire.

After dark, the shelling reached deeper into residential areas. Fireballs lit up the horizon to the east, setting off blazes on the ground and silhouetting Gaza's tall buildings. Tracer fire ripped across the skyline.

The State Department said the U.S. was pressing for a cease-fire that would include a halt to rocket attacks and an arrangement for reopening crossing points on the border with Israel, said spokesman Sean McCormack. A third element would address the tunnels into Gaza from Egypt through which Hamas has smuggled materials and arms.

President George W. Bush emphasized "Israel's desire to protect itself."

"The situation now taking place in Gaza was caused by Hamas," he said.

The deputy head of Hamas' politburo in Syria, Moussa Abu Marzouk, rejected the U.S. proposal, telling the AP the U.S. plan seeks to impose "a de facto situation" and encourages Israel to continue its attacks on Gaza.

French President Nicolas Sarkozy, who unsuccessfully proposed a two-day truce last week, met with Palestinian President Mahmoud Abbas, who lost control of Gaza to Hamas in June 2007.

Europe "wants a cease-fire as quickly as possible," Sarkozy said after meeting Abbas, urging Israel to halt the offensive, while blaming Hamas for acting "irresponsibly and unpardonably."

A European Union delegation met with Foreign Minister Tzipi Livni.

"The EU insists on a cease-fire at the earliest possible moment," said Karel Schwarzenberg, the foreign minister of the Czech Republic, which took over the EU's presidency last week from France. Rocket attacks on Israel also must stop, Schwarzenberg told a news conference with Livni.

The EU brought no truce proposals of its own because the cease-fire "must be concluded by the involved parties," he added.

As the bruising campaign ended its 10th day, Hamas pummeled southern Israel with more than 30 rockets and promised to wait for Israeli soldiers "in every street and every alleyway."

Israeli Defense Minister Ehud Barak said the offensive would go on until Israel achieved "peace and tranquility" for residents of southern Israel.

One of the rockets struck a large outdoor market that was closed at the time in the town of Sderot, just across Gaza's northeastern border. Another hit a kindergarten in the coastal city of Ashdod, north of the strip. The kindergarten, like schools across southern Israel, was closed and empty because of the rocket threat.

Israel has three main demands: an end to Palestinian attacks, international supervision of any truce, and a halt to Hamas rearming. Hamas demands an end to Israeli attacks and the opening of border crossings to vital cargo.

Livni said the operation was designed to change the rules of Israel's struggle against Hamas after years of firing rockets at Israel. From now on, she said, "when Israel is targeted, Israel is going to retaliate."

Israeli military spokeswoman Maj. Avital Leibovich said Hamas was to blame for civilian casualties because it operates in densely populated areas.

"If Hamas chose cynically to use those civilians as human shields, then Hamas should be accountable," she said.

Hamas leader Mahmoud Zahar exhorted Palestinians to fight the Israeli forces and target Israeli civilians and Jews abroad.

"The Zionists have legitimized the killing of their children by killing our children. They have legitimized the killing of their people all over the world by killing our people," Zahar said in a grainy video broadcast on Hamas TV.

Israel's operation has sparked anger across the Arab world and has drawn criticism from countries such as Turkey, Egypt and Jordan, which have ties with Israel and have been intimately involved in Mideast peacemaking.

In Beirut, Lebanon, protesters tried to pull away barbed wire blocking their path to the U.S. Embassy. They were driven back with heavy blasts of water. (The Jakarta Post)

4. Singapore appoints envoy to ASEAN

Singapore's Permanent Representative to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Lim Thuan Kuan, on Monday presented his credentials to ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan at a ceremony at the ASEAN Secretariat in Jakarta.

Singapore became the first ASEAN member state to appoint a permanent representative, the secretariat said in a statement.

The ASEAN Charter, which took effect on Dec. 15, 2008, obliges all 10 member states to appoint a permanent representative with the rank of ambassador to be based in Jakarta.

The representatives, who will constitute the Committee of Permanent Representatives, are tasked with supporting the work of the ASEAN Community Councils, coordinating with ASEAN National Secretariats and other ASEAN sectoral ministerial bodies, as well as liaising with the bloc's secretary-general and secretariat.

"We are pleased to receive Ambassador Lim," Pitsuwan said.

"I am certain his experience in ASEAN affairs will contribute much to the ASEAN community-building effort currently underway. I hope the rest of the member states will also appoint their permanent representatives to ASEAN very shortly."

Lim previously served as Singapore's ambassador to Vietnam. (The Jakarta Post)

5. GAM dan RI Lakukan Pertemuan di Finlandia

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia (RI) melakukan pertemuan di Helsinki, Finlandia, untuk membahas sejumlah agenda terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat Aceh.

Menurut informasi yang diperoleh di Den Haag, Minggu (4/1), pertemuan tertutup tersebut berlangsung di salah satu hotel di Helsinki, Finlandia selama dua hari, yakni pada 4-5 Januari 2009.

Menurut Koordinator World Acehnese Association (WAA), Tarmizi Age, berdasarkan informasi yang ia diterima dari salah seorang delegasi GAM, pertemuan ini membahas agenda umum, seperti masalah keamanan dan hak-hak azasi masyarakat Aceh pasca konflik yang melibatkan kedua belah pihak.

"Kami dapat informasi kalau pertemuan itu berlangsung secara tertutup dan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya umum," jelas Tarmizi.

Sebab itu lanjutnya, pihaknya meminta agar dalam pertemuan itu, GAM dan Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kredibilitas MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di Finlandia pada 15 Agustus 2009 demi keberlangsungan perdamaian di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi GAM, diantaranya diwakili Mentroe Malik, Dr. Zaini, Ampon Nazar dan Syamsuddin, juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA).

Sementara dari delegasi RI, diantaranya diwakili Menteri Infokom, Sofyan Djalil, dr. Farid Husain dan Dirjen Departemen Hukum dan HAM, Prof. Tuti.

Pertemuan GAM dan RI itu juga, dihadiri Juha Christensen dan Robert dari Yayasan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) interpeace, Kelle dari Crisis Management Initiative (CMI) dan Pieter Fieth, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM). (Jurnal Nasional)

6. SBY: Israel-Palestina Bukan Konflik Agama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah RI menilai serangan Israel ke kawasan Gaza di mana bermukim penduduk Palestina, bukanlah dipicu karena konflik antaragama. Namun, perang tersebut dipicu masalah konflik kedaulatan yang sudah terjadi relatif permanen.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat menjawab pers, sesuai menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Al Mehdawi, yang diundang datang ke Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (5/1) malam.

"Ini sebetulnya tidak mengait langsung konflik antar agama. Ini adalah konflik kedaulatan. Sebuah permusuhan yang relatif permanen. Jadi, sebetulnya, lebih bagus jangan dikaitkan dengan isu agama. Karena Paletina melawan Israel. Israel melakukan tindakan militer yang berlebihan, yang eksefif sehingga menimbulkan korban yang tidak semestianya terjadi," ujar Presiden

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Presiden telah memberikan pengarahan agar untuk menggalang dukungan dunia internasional di PBB untuk menghentikan serangan Israel.

Indonesia lebih baik mendekati negara-negara yang tergabung dalam Non Blok daripada negara-negara yang tergabung dalam Negara-negara Islam OKI. Di OKI hanya terdapat 54 negara, sedangkan negara-negara Non Blok jumlahnya 113 negara.

"Yang penting adalah dicapai dulu gencatan senjata baru kemudian dilakukan proses perdamaian dengan melakukan perundingan kembali," ujar Hassan. (Kompas)

7. Bantuan Kemanusiaan RI Disalurkan Melalui Yordania

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia untuk rakyat Palestina di jalur Gaza yang menjadi korban agresi Israel sudah memasuki Yordania.

"Tadi saya hubungi KUI di Amman yang menginformasikan bahwa bantuan kemanusiaan telah bergerak memasuki Yordania pagi ini (waktu setempat)," kata Faiza di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Faiza, bantuan kemanusiaan RI menuju Ramallah melalui Yordania sebelum kemudian menuju ke Jalur Gaza. "Bantuan disalurkan kepada Pemerintah Palestina kemudian yang bersangkutan akan menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan di Gaza," ujarnya.

Faiza menjelaskan bahwa pengaturan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui organisasi kemanusiaan di bawah Raja Yordania yang dipercaya oleh pihak Israel. "Prosedurnya memang begitu," katanya.

Sementara itu, terkait dengan keinginan sejumlah organisasi masyarakat di Indonesia untuk mengirimkan sukarelawan ke Palestina, Faiza mengatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui hal itu. "Pemerintah melarang pengiriman," katanya.

Menurut Faiza, untuk memasuki Gaza juga tidak mudah karena harus melakukan kerja sama dengan Pemerintah Mesir. "Kalaupun ingin membantu, lebih baik dalam bentuk yang memang diminta oleh rakyat Palestina, yaitu uang ataupun makanan dan obat-obatan," ujarnya.

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan uang tunai sebesar satu juta dollar AS serta makanan dan obat-obatan untuk meringankan beban masyarakat Gaza yang menjadi korban agresi Israel. (Kompas)

8. Mesir Berupaya Fasilitasi Bantuan Indonesia masuk Gaza

Pemerintah Mesir berjanji akan memfasilitasi Indonesia dalam menyampaikan bantuan obat-obatan, ambulan dan keperluan logistik lainnya langsung kepada warga Palestina di Gaza.

"Pernyataan pemerintah Mesir itu tentu amat kita sambut baik, dan kita berharap dalam satu atau dua hari ini, sudah ada kepastian untuk bisa membawa bantuan kemanusiaan dari Indonesia langsung ke Jalur Gaza," kata Direktur Urusan Timur Tengah Deplu RI, Aidil Chandra, yang bersama Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Depkes Rustam S Pakaya memimpin delegasi Indonesia menemui Asisten Menlu Mesir untuk Urusan Negara Arab Abderahman Salaherdin di Kairo, Mesir.

Aidil Chandra Salim mengemukakan bahwa pernyataan tersebut cukup melegakan, mengingat upaya yang sama melalui pintu masuk di perbatasan Yordania-Palestina sebelumnya tidak terwujud akibat kendala yang ada, yakni harus melalui daerah yang masuk wilayah Israel, yakni Tepi Barat.

Delegasi Indonesia yang diantar langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Mesir AM Fachir itu adalah tim aju awal, yakni Kepala Pusat Pengendalian Krisis (PPK) Depkes Rustam S Pakaya, Direktur Urusan Timur Tengah Deplu Aidil Chandra Salim, Lucky Tjahjono (PPK

Depkes), Presidium MER-C Joserizal Jurnalis, Mohammad Mursalim (MER-C), Agus Kooshartoro dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Basuki Supartono (BSMI) dan Arif Rahman (Muhammadiyah).

Pada pertemuan Senin pagi, sebelum bertemu Asisten Menlu Mesir tersebut, Jose Rizal Jurnalis menyampaikan kepada Dubes AM Fachir bahwa bantuan kemanusiaan dari Indonesia, baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya, hendaknya bisa langsung dipastikan dapat diterima di Jalur Gaza.

"Setelah kita gagal masuk Jalur Gaza melalui pintu masuk perbatasan Yordania, maka satu-satunya jalan adalah melalui pintu Mesir, yang aksesnya lebih dekat, dan tentu kita semua berharap bantuan dari Indonesia ini dapat dipastikan masuk ke Gaza," katanya.

Menurut Aidil Chandra Salim, setelah adanya "lampu hijau" dari pemerintah Mesir yang akan membantu fasilitas dan perizinan masuknya bantuan Indonesia ke Jalur Gaza melalui pintu Rafah, maka ini yang perlu segera disiapkan adalah daftar rinci bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan maupun mobil ambulans, yang kemudian akan dibuatkan Nota Diplomatik oleh Kedubes RI, agar Kementerian Luar Negeri Mesir bisa segera memrosesnya.

"Kalau bantuan itu sudah siap hari ini atau besok, mereka (pemerintah Mesir) berjanji akan mengurus izinnya, dan bantuan dinyatakan bisa masuk ke Gaza melalui pintu Rafah," kata ahli bedah tulang, yang telah berkali-kali melakukan tugas misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia maupun berbagai negara itu.

Pada bagian lain, Aidil Chandra Salim menambahkan bahwa satu sosok lain yang berperan penting untuk memutuskan bahwa bantuan Indonesia bisa "dikawal" masuk ke Gaza adalah Yasser Osman, Ketua Departemen Palestina pada Kementerian Luar Negeri Mesir.

"Saya pastikan bantuan (kemanusiaan) dari Indonesia ini akan bisa sampai ke Jalur Gaza melalui pintu Rafah," kata cucu pahlawan nasional H Agus Salim itu mengutip lagi ucapan Yasser Osman.

Sedangkan Rustam S Pakaya menambahkan bahwa pihak Mesir menyatakan bahwa bila dari Indonesia punya akses langsung ke Rumah Sakit Shifa di Gaza, diharapkan bisa berkomunikasi agar pihak rumah sakit bisa mengirimkan wakil untuk bisa keluar dari Gaza, dan menuju ke perbatasan di Rafah agar bisa menerima langsung bantuan dimaksud.

"Bagaimanapun juga disampaikan oleh Asisten Menlu Mesir bahwa Jalur Gaza itu adalah wilayah pendudukan Israel, sehingga tidak mudah untuk bisa masuk ke Jalur Gaza, sehingga perlu dicarikan upaya yang sama-sama bisa diterima," katanya.

Aidil Chandra Salim dan Jose Rizal Jurnalis pun menguatkan bahwa memang di perbatasan, meski ada empat pihak yang punya kewenangan untuk izin masuk keluar-masuk orang dan barang, yakni Mesir, pejabat Uni-Eropa, Israel dan Palestina, namun oleh Israel di kawasan itu dinyatakan sebagai zona "darurat militer". (Media Indonesia)

9. Reputasi Mahmoud Abbas Dipertaruhkan di Dewan Keamanan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas direncanakan tiba di New York Selasa (6/1) pagi waktu setempat. Rencananya, Palestina mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa segera menurunkan resolusi gencatan senjata.

Pemimpin otoritas Palestina ini meski tidak mempunyai kekuatan politik di Gaza dan menjadi pesaing Hamas ini, secara tidak langsung mewakili Palestina dalam pertemuan di PBB nanti. Reputasi Abbas akan dipertaruhkan dalam pertemuan Dewan Keamanan sore, atau Rabu (7/1) pagi waktu Indonesia.

Sementara diplomat Arab berharap bisa memaksakan resolusi baru dan berharap memenangkannya dengan dukungan dari 15 anggota tidak tetap dewan keamanan, meski dibayangi oleh veto Amerika. Palestina menginginkan gencatan senjata permanen dan menghentikan agresi Israel ke Gaza. Serta membuka blokade perbatasan agar bantuan kemanusiaan dan keamanan internasional bisa masuk untuk melindungi penduduk sipil.

Dewan Keamanan akan membuka pertemuan pada Selasa sore ini, yang akan dihadiri Menteri Luar Negeri Bernard Kouchner dan duta besar Prancis untuk PBB Jean Maurice Ripert. "Kita ingin segera membuat resolusi secepat mungkin," ujar Ripert. (Tempo Interaktif)

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Presiden Tak Intervensi Kasus Muchdi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dirinya tidak pernah mengintervensi proses hukum Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

"Saya tekankan, tidak boleh saya bilang ke polisi, kejaksaan atau kehakiman untuk menghentikan proses itu," kata Presiden dalam pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (5/1).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Suharto dengan anggota Ahmad Yusak dan Haswandi, Rabu (31/12) membebaskan Muchdi, mantan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN).

Presiden menuturkan, dirinya mengetahui Muchdi dibebaskan saat di Departemen Keuangan, 31 Desember 2008. "Waktu itu, melalui Andi Mallarangeng, wartawan ingin minta komentar saya mengenai kasus itu. Saya katakan, saya Presiden, tidak mungkin mengomentari segala hal setiap hari."

Menurut SBY, dirinya hanya mengomentari isu-isu fundamental seperti bencana alam, gangguan keamanan, atau hal-hal yang sifatnya *emergency*. "Hal itu karena posisi saya sebagai Presiden yang lebih pada pembuat kebijakan," katanya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan kejaksaan akan melakukan kasasi atas vonis bebas murni Muchdi. "Iya dong. Yakin kita bahwa ada perbuatan *kok*," kata Hendarman di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).

Saat ini kejaksaan mempersiapkan memori kasasi, tapi tidak ada kelengkapan berkas yang harus disertakan. "Kasasi itu adalah kepada *judex jurist* menyatakan bahwa keputusan itu pertama kali bukan bebas murni tapi lepas dari tuntutan hukum. Itu harus dibuktikan oleh jaksa," katanya.

Kejaksaan juga tidak akan mengajukan bukti baru. "*Gak* ada masalah *novum*, kalau itu peninjauan kembali. Kasasi itu bukan masalah *novum* tetapi ada pertimbangan pada *judex factie* yang ada kekeliruan."

Bukan Politisasi

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M. Ridha Saleh mengingatkan Presiden untuk mengabaikan kritik dari pendukung Muchdi yang menuding Presiden melakukan politisasi dalam perkara pembunuhan Munir.

Komnas HAM memandang Presiden berkewajiban mengarahkan seluruh aparat Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk mengungkap lebih dalam dalang pembunuhan Munir setelah vonis bebas mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon kepada pers, Minggu (4/1) menyatakan, rencana Presiden memanggil Jaksa Agung dan Kapolri terkait bebasnya Muchdi lebih bernuansa politik pencitraan pemerintahannya.

Fadli mengatakan, seharusnya Presiden menghargai hukum dan tidak melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif. Dia menuding pengadilan terhadap Muchdi bukan untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia, tapi lebih merupakan manuver politik penguasa.

Ridha menilai, pemanggilan Jaksa Agung dan Kapolri oleh Presiden bukan politisasi kasus Munir. Pasalnya, sebagai Kepala Negara, Presiden berhak mengerahkan kejaksaan dan kepolisian sebagai bawahannya untuk menindaklanjuti putusan hakim yang membebaskan Muchdi. Langkah tersebut patut dilakukan Presiden karena kasus pembunuhan Munir telah mendapat sorotan internasional, yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Indonesia dalam penegakan hak asasi.

Sejumlah aktivis hak asasi manusia yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) bersama isteri almarhum Munir, Suciwati, kemarin mengadu ke Komisi Yudisial terkait dengan putusan hakim yang membebaskan Muchdi.

Atas laporan Kasum dan Suciwati, Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas menilai adanya unsur ketidakadilan atas putusan majelis hakim yang membebaskan Muchdi. Dia menyatakan, pekan ini Komisi Yudisial akan menggelar rapat internal guna mengkaji salinan putusan majelis hakim yang membebaskan Muchdi.

"Kalau KY temukan hakim yang tidak profesional sesuai *code of conduct*, KY bisa panggil hakim dan setelah itu baru ditentukan sanksinya," kata Busro. Namun, Busyro menyatakan belum bisa menentukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim.

Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang juga anggota Kasum, mengatakan pihaknya melapor ke Komisi Yudisial lantaran ditemukan pelanggaran *code of conduct* yang dilakukan majelis hakim.

Setelah mengadu ke Komisi Yudisila, Usman menambahkan, Kasum akan segera mendatangi Kejaksaan Agung dan Kepolisian agar mempersiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. President Yudhoyono calls for cooking oil and meat prices cut

President Susilo Bambang Yudhoyono said that meat and cooking oil prices would decline following a drop of the prices of the commodities on the world market, and last December's fuel price cut.

"The trade ministry will soon cut the price of the commodities. It has become a policy, because the reduction is reasonable," the president said when opening the activities of the Jakarta Stock Market (BEI) here Monday.

In the meantime the price of meat should also be reduced by making changes in the trading systems.

The President also said that the government is reevaluating last December's fuel cut impact, which was supposed to reduce industrial production cost and bring about price stability. (Antara)

2. Presiden belum puas soal anggaran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya belum puas dengan dengan pola pengeluaran anggaran yang masih menumpuk pada triwulan terakhir tahun lalu.

Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Istana Negara, siang tadi.

"Silakan masing-masing melakukan introspeksi. Saya berharap, pola ini bisa lebih merata setiap triwulan, khususnya tahun ini di mana siklus perekonomian diperkirakan akan lebih berat dalam paruh pertama dibandingkan dengan paruh kedua," ujarnya.

Dari sisi pengeluaran, lanjut Presiden, tidak semua komponen berhasil dibelanjakan tepat waktu dan sesuai rencana. Belanja Kementerian dan Lembaga hanya mencapai 91,5% dari total anggaran yang tersedia. Capaian ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan belanja kementerian dan lembaga pada 2007 yang mencapai 92%.

"Saya mendapatkan penjelasan, penurunan ini sebagian merupakan akibat dari efisiensi, kalau itu yang terjadi berarti baik, baik dalam proses pengadaan barang maupun dalam pelaksanaan belanja modal pemerintah," ujarnya.

Presiden menambahkan beberapa kementerian yang telah mengadakan e-procurement berhasil menekan pengeluarannya hingga 10% hingga 20%.

Perbaikan ini, ujar Presiden, dapat ditularkan pada semua departemen dan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah pada semua tingkatan. "Dengan anggaran yang sama, kami dapat melaksanakan kegiatan jasa publik ini dengan volume kegiatan yang lebih besar." (Bisnis Indonesia)

3. President says no need for investors to worry about security

President Susilo Bambang Yudhoyono guaranteed security during the general elections this year, and assured investors not to worry about their security.

"Indonesia will be able to maintain security, so that it is not necessary for investors to be afraid of anything. No need for them to remain in a wait-and-see position or procrastinate their investment," the head of state said at the Jakarta Stock Exchange building here on Monday.

Yudhoyono made the remarks in a dialogue with market shareholders after officially opening the first trading session at the bourse in 2009.

According to the president, investors during a general elections normally maintained a wait-and-see stance before deciding on an investment.

"We had a direct election in 2004 and since then over 200 provincial and district leaders' election had been implemented. Meanwhile, we have also conducted direct democracy in many foreign countries," he said, adding that therefore, the government along with the general elections commission (KPU), the general election supervisory agency, the constitutional court, regional KPUs, and the police should carry out their tasks well.

In the current situation, the president believed that Indonesia would be able to manage and control the country's politics and security during the general elections.

"There will be some clashes, friction and difficult campaigns. These incidents often happened in advanced countries and in the developing countries," he said.

The president said that general election should not be seen as a tense period or a burden to the community, but placed in an appropriate position.

On the occasion, the president also asked domestic investors to concentrate more on efforts to improve market capitalization in share trading at the Indonesian Stock Exchange (BEI), predicted to be able to support the BEI. (Antara)

4. Indonesia Belum Miliki Master Plan Pembangunan Nasional

Indonesia belum memiliki "blue print" atau master plan pembangunan nasional yang dapat menjadi arah dan acuan program sepanjang masa meski terjadi pergantian pemimpin nasional.

"Selama ini, yang sering ditampilkan hanya jargon secara personal bukan menjalankan blue print yang telah ditetapkan," kata Wakil Ketua Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Sumut, Rachmad Munthe di Medan, Selasa (6/1).

Menurut Munthe, para elit politik nasional perlu merancang blue print pembangunan Indonesia untuk jangka panjang yang harus disepakati dan dijalankan secara konsisten meski kepemimpinan nasional terus berganti.

Hal itu diperlukan agar tujuan pembangunan di Indonesia terarah dan bukan mengikuti "selera" dan keinginan pemimpin yang sedang berkuasa.

Ia mencontohkan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang pernah diterapkan mantan Presiden Soeharto sehingga proses pembangunan pada masa itu cukup terprogram.

"Sayangnya, konsep Repelita tersebut dinodai oleh praktik korupsi banyak oknum pejabat pada masa itu," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN). (Jurnal Nasional)

5. BBM Langka, Presiden Tegur Pertamina

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur PT Pertamina (Persero) terkait kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama premium, di sejumlah daerah. Presiden meminta Pertamina meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

"Saya tidak happy kemarin ketika mengikuti media massa, sebagai contoh ada keterlambatan bahan bakar, ada statement, entah hanya excuse saja dari jajaran Pertamina, karena hari libur dan mengenalkan sistem baru. Ini salah," ujar Presiden SBY dalam sambutannya saat membuka transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, segala persoalan yang menyangkut pelayanan masyarakat harus direspons cepat karena prinsipnya negara tidak pernah libur melayani warganya. Libur bukan berarti semua sistem pelayanan masyarakat berhenti begitu saja. "Tidak ada excuse seperti itu lantas lalai, lantas tidak berkomunikasi dengan rakyat, lantas tidak responsif. Itu keliru," paparnya.

Presiden menegaskan bahwa aparat pemerintah dan instansi yang bekerja melayani masyarakat harus selalu berjaga dan bersiap mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat."Saya katakan kita harus ngantor. Kita harus respons pada saatnya.Ini berlaku untuk seluruh jajaran pemerintahan," tambahnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerjunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang migas terkait kelangkaan BBM. Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, sejak 2 Januari 2009 lalu BPH Migas telah menurunkan PPNS ke beberapa lokasi. Pada Sabtu (3/1) PPNS BPH Migas menemukan satu SPBU yang tutup di kawasan Jalan Yos Sudarso, Jakarta, karena premiumnya habis. "Ternyata mereka masih punya solar. Akhirnya, mereka ditindak oleh Polsek Tanjung Priok,"katanya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira mengatakan, terkait kelangkaan BBM bersubsidi, Departemen ESDM telah mendapat laporan dari BPH Migas bahwa Pertamina telah menyampaikan penyebab kelangkaan. Berdasar laporan itu kelangkaan BBM akibat sistem baru di Pertamina yang menerapkan real time proses delivery order (DO).

Selain itu, akibat kenaikan konsumsi BBM bersubsidi saat liburan bersama dalam rangka Natal 2008 dan Tahun Baru 2009. "Di bagian lain, stok BBM bersubsidi di SPBU mengalami keterbatasan,"ujar Sutisna. Vice President Communication Pertamina Anang Noor mengatakan, demi memperlancar pasokan BBM ke SPBU, Pertamina telah mengambil langkah-langkah darurat. Langkah dimaksud antara lain pembukaan depot selama 24 jam, pemenuhan BBM ke banyak SPBU yang mengalami kekosongan suplai, serta pemberian fasilitas kredit kepada SPBU.

Masih Langka

Kelangkaan premium di sejumlah daerah masih terjadi hingga kemarin. Di Surabaya, stok premium kembali kosong di beberapa SPBU. Kekosongan premium itu terjadi di SPBU di Jalan Diponegoro, Jalan Indragiri, dan Gunung Sari.

Namun, Eviyanti, external communication Pertamina Surabaya, menyatakan kekosongan itu hanya bersifat sementara dan seluruhnya telah teratasi petang kemarin. Di Tegal, Jawa Tengah, tiga SPBU terpaksa tutup karena kehabisan stok premium. Kelangkaan pasokan mulai terjadi sekitar pukul 11.00 hingga pukul 14.30 WIB kemarin lantaran premium dari Depo Tegal.

Tiga SPBU yang kehabisan stok premium ialah SPBU Singkil, Kecamatan Adiwerna; SPBU Karanganyar, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal; dan SPBU Jalan KS Tubun, Kota Tegal. Tiga SPBU itu memasang papan pengumuman di depan pintu masuk dengan tulisan "Maaf Premium Habis".

Staf SPBU Singkil, Sutrisno, 43, mengatakan stok premium habis sejak pukul 11.00 kemarin. "Kami belum dapat kiriman lagi dari Depo Tegal. Biasanya pagi sudah dikirim tapi sampai siang ini belum datang juga,"katanya kemarin. Operator SPBU KS Tubun Kota Tegal, Ida, mengaku stok premium sudah habis sejak pukul 08.00. SPBU itu sudah mengontak Depo Pertamina Tegal, namun hingga pukul 13.00 kemarin pasokan premium belum datang. Sales Area Manager Pertamina Tegal Nurhadiya membantah kelangkaan premium akibat keterlambatan pengiriman DO oleh Pertamina. Menurut dia, DO atau surat tebusan dari tiga SPBU itu sudah dikirim. Kelangkaan premium juga terus terjadi di wilayah Jawa Barat. Di Kabupaten Cianjur, kelangkaan premium akibat pasokan dari Pertamina kurang lancar. Beberapa SPBU di Cianjur hingga kemarin tidak beroperasi. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

:

1. Wisatawan Australia ke Bali Meningkat 56, 80 Persen

Kunjungan wisatawan Australia ke Bali selama periode Januari-November 2008 tercatat sebanyak 286.998 orang atau 15,72 persen dari total kunjungan wisman ke Pulau Dewata sebanyak 1.825.448 orang.

"Kunjungan wisatawan Australia mengalami peningkatan paling tinggi, yakni 56,80 persen dibandingkan dengan 10 negara yang selama ini paling banyak memasok turis ke Bali," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Ida Komang Wisnu di Denpasar, Selasa (6/1).

Ia mengatakan, kunjungan wisatawan asal Negeri Kanguru itu selama bulan November 2008 sebanyak 183.033 orang atau mengalami peningkatan 56,80 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2007.

Australia yang menempati urutan kedua setelah Jepang yang warga negaranya paling banyak berlibur ke Bali. Dari 10 negara yang warganya paling banyak mengunjungi Pulau Dewata, Jepang menempati urutan teratas dengan kunjungan sebanyak 338.003 orang atau 18,52 persen dari total turis ke Bali. Menyusul Korea Selatan, setelah Australia, menempati urutan ketiga dengan 124.098 orang (6,80 persen), Taiwan 120.810 orang (6,62 persen), dan Cina 118.665 orang (6,50 persen).

Sementara itu, masyarakat Malaysia yang berliburan ke Bali tercatat 113.409 orang atau 6,21 persen dari jumlah kunjungan wisman ke Bali, Jerman 77.316 orang (4,24 persen), Inggris 77.316 orang (4,24 persen), Perancis 71.788 orang (3,93 persen), Amerika Serikat 61.770 orang (3,38 persen), dan negara lainnya 436.977 orang (23,94 persen).

"Dari 10 negara yang paling banyak memasok wisatawan ke Bali, hampir semuanya mengalami peningkatan, kecuali Taiwan yang turun 8,61 persen dan peningkatan paling tinggi adalah Australia sebesar 56,80 persen," ujar Ida Komang Wisnu. (Kompas)

2. Kebijakan Soal Keagamaan masih Lemah

Banyaknya kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, kekerasan di sini kurang lebih diartikan tindakan fisik baik kepada manusia maupun barang dengan tujuan menghancurkan, merusak atau melukai. Hal ini tidak lepas dari lemahnya kebijaksanaan keagamaan di era reformasi dimana arti pembebasan dan pembatasan kebebasan beragama semakin rancu.

Menurut penelitian yang dilakukan CRCS Gajah Mada (Center For Religious and Cross Cultural Studies) menunjukkan bahwa tujuh tahun pertama reformasi (1998-2006) pada umumnya lahir kebijakan nasional mendasar dan konstruktif bagi pembangunan dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia.

Namun setelah itu politik hukum kebijakan keagamaan di Indonesia bergeser pada apa yang disebut pembatasan kebebasan beragama yang dari waktu ke waktu semakin mendalam.

Titik lemah paling mencolok ialah tidak adanya perspektif harmonisasi hukum untuk mengevaluasi kebijakan keagamaan yang dihasilkan oleh pemerintahan era sebelumnya terutama orde baru. Kondisi ini memberikan jalan pada menguatnya kembali pemanfaatan kebijakan keagamaan di masa lalu yang secara substansial malah bertentangan dengan HAM.

Salah satunya UU No.1/PnPs/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, pada umumnya proses munculnya tuduhan penodaan agama diawali konflik antar masyarakat sipil, pada tingkat tertentu beberapa ormas tertentu memiliki andil besar untuk mendorong proses munculnya penodaan agama.

Salah satu kasus kekerasan agama yang terbesar adalah yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sayangnya Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, selepas dari perdebatan teologis itu sendiri apakah JAI penodaan agama atau bukan, namun JAI adalah warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi.

"Sebaiknya kasus JAI ini dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk menangani kasus serupa" Ujar Zainal Abidin Bagir, Direktur eksekutif CRCS UGM, dalam forum diskusi kehidupan umat beragama (05/01) di Universitas Paramadina Jakarta.

"Karena Teologis dan HAM memang tidak bisa disatukan maka pemerintah harus menentukan sikap yang jelas, dimana aparat dan lembaga-lembaga yang berwenang harus jelas berdiri," tambahnya.

Sementara itu Stanley Adi Prasetyo selaku komisioner komnas HAM melihat, petugas-petugas, Polisi, Polda dan lembaga yang terlibat harus diberikan edukasi tentang HAM karena ketika ditanya apa itu HAM dan implementasinya mereka sendiri tidak mengerti" Ujar Stanley.

Menurutnya, Undang Undang PNPS No 1 sudah tidak relevan, selain mudah ditunggangi politik, UU ini tidak jelas standarisasinya, bila standarnya saja tidak jelas bagaimana membatasinya, lalu siapa yang berhak menentukan penodaan Agama atau bukan nya.

Kehidupan beragama di Indonesia menurutnya, bagai bara dalam sekam, Laporan tidak pernah berhenti ke komnas HAM walau kami tidak dapat publikasikan karena dapat membahayakan keselamatan anggota dan si pelapor itu sendiri.

Sementara itu, Romo Franz Magnis Suseno, ketua dari STF Driyakarna, selaku wakil dari kelompok minoritas, mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. "Apakah dengan adanya Perda-perda Syariah tempat ini akan tetap menjadi rumah yang menaungi bagi kami," ujar pria kelahiran Jerman tersebut. (Media Indonesia)

3. Sosialisasi Jam Masuk Kerja Mulai Pekan Ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengungkapkan, sosialisasi perubahan jam kerja akan dimulai minggu ini. "Saya sendiri akan turun untuk memberikan pengarahan kepada para pemimpin perusahaan mengenai berbagai keuntungan jika pegawai swasta turut serta merubah jam masuk kerjanya," kata dia, Senin (5/1).

Dia menjelaskan, pihaknya bersama PT Pamintori akan menyiapkan jadwal eksisting masuk kerja perusahaan-perusahaan di Jakarta.

Sebelumnya, pemprov juga mengungkapkan akan mengimbuai perusahaan swasta untuk mengatur jam masuk kerja. Untuk perusahaan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masuk pukul 07.30 WIB, untuk Jakarta Timur dan Jakarta Barat masuk pukul 08.00 WIB, sedangkan Jakarta Selatan jam masuk pukul 09.00 WIB.

Prijanto mengajak agar warga Jakarta menggunakan jalan secara bergantian. Dia menjelaskan, untuk menggugah bahwa kemacetan di Jakarta adalah hal yang luar biasa, harus disikapi bersama. "Karena banyaknya kerugian yang mencapai triliunan akibat kemacetan," kata dia.

"Secara teori kalo bisa teratur dan diatur maka akan bisa urai macet," ujarnya. (Tempo Interaktif)

D. HANKAM :

1. Presiden Ingatkan Pertimbangan Keselamatan Sebelum ke Palestina

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tetap mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum berangkat ke kota Gaza untuk membantu warga Palestina yang diserang oleh pasukan Israel.

"Kebijakan pemerintah, adalah bagaimana bantuan kemanusiaan bisa sampai dan langkah diplomasi kita kena. Gencatan senjata itu yang terbaik. Keselamatan warga Indonesia juga penting," kata Presiden saat jumpa pers usai bertemu Dubes Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Presiden menegaskan dalam kasus warga Palestina di Gaza, Pemerintah memutuskan kebijakan untuk bisa berkontribusi memberikan bantuan dengan tetap menjaga keselamatan warganya.

"Tujuan kita membantu, mewujudkan solidaritas dengan cara-cara yang tepat. Jadi pilihlah cara-cara yang bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi masalah," kata Presiden menanggapi banyaknya kelompok masyarakat yang akan berangkat ke jalur Gaza untuk membantu warga Palestina.

Menurut Presiden, pengalaman beberapa kejadian seperti ini pernah terjadi, ketika ada beberapa warga masyarakat yang berangkat ke suatu negara konflik justru membuat tambahan tugas bagi pemerintah untuk melindunginya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengeluarkan resolusi meminta dilakukan gencatan senjata antara pasukan Hamas dan Israel di Gaza.

"Jika DK PBB tidak berhasil mengeluarkan resolusi ini, masih ada mekanisme lain yaitu meminta majelis umum PBB melakukan sidang darurat," katanya.

Presiden juga menyatakan, Indonesia siap mengirimkan pasukannya jika di Gaza telah diberlakukan gencatan senjata dan dibutuhkan tim monitoring untuk menjaga perdamaian di wilayah itu. (Antara)

E. HUKUM :

1. Public courts toothless in graft fight, say watchdogs

Anti-corruption groups have criticized public courts for allowing corruption suspects to make them their "heaven", as most graft suspects tried by the lowest to top courts this year were set free.

During 2008, there were at least 194 corruption cases handled by district, high and supreme courts, involving 444 suspects, but 277 of them, or 67 percent, were acquitted of all charges. Only 167 were convicted, according to Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW said that of the 167 convicts, 78 were sentenced to less than a year in prison and 22 were jailed for between one and two years.

Eighteen suspects were sent to jail for two to five years, five were sentenced to between five and 10 years, and only one received more than 10 years' imprisonment, while the remaining 10 were granted suspended jail sentences.

"Less than a year in prison will not deter corruption, let alone suspended jail terms," ICW legal coordinator and court monitor Emerson Yuntho told a year-end conference Sunday. He said this fact was incongruous with the cases handled by the Corruption Court.

"During 2008 there were 27 cases with 31 suspects tried by the Corruption Court, and all of them were found guilty," he said.

Emerson said there were several reasons behind the high number of suspects released by public courts.

The first was that the suspects were truly found not guilty. The second was that the indictments composed by prosecutors were weak, or weakened on purpose. And the third was that judges deliberately looked for considerations that benefited the suspects.

"The last two reasons dominated their verdicts to release the defendants," he said.

For example, Emerson cited a corruption case implicating former Central Java's Pati legislative council speaker Wiwik Budi Santoso and his deputy Mundir Syarif, who were charged with embezzling Rp 2.6 billion (US\$234,911) of their city's budget in 2004.

"They were all freed because they returned the money to the state, so the judges ruled there was no state loses in the case," Emerson said.

Such a consideration, he argued, actually contradicted Article 5 of the 1999 Anti-Corruption Law, which strictly stipulates that restituting state loses does not dismiss someone from criminal charges.

Director of the Center for Anti-Corruption Study (Pukat) at the Gajah Mada University, Zainal Arifin Mochtar, shared similar views, saying there was a significant disparity between verdicts handed down by the Corruption Court and the general courts.

"We conducted a study in 2008 to compare the performance of these two courts and we found that most of the cases handled by public courts only sentenced convicts to one year in prison, while the Corruption Court mostly jailed suspects for at least five years," he told *The Jakarta Post*.

He said there were only two reasons behind the performance disparity between the two courts -- a lack of political will and poor capacity.

"These two reasons take turns in the public court's way of upholding the law," Zaenal said. He said the incapacity element could still be overcome by conducting training to improve the ability of law enforcers.

"It's the aspect of political will that matters the most because it involves many factors: money, power and court mafia," he added.

Both the ICW and Pukat urged the government and the House of Representatives to endorse a Corruption Court bill to strengthen the existence of corruption courts.

"The main reason the Corruption Court was established is because we can no longer put the trust to public courts," Zainal said. (*The Jakarta Post*)

2. ICW Kembali Datangi KPK, Terkait DAU

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni di Jakarta, Selasa pagi (6/1). Kedatangan ICW kali ini untuk memberi data tambahan tentang dugaan penyalahgunaan uang Dana Abadi Ummat (DAU) sejak 2005 lalu.

"Kami Kesini untuk menyerahkan beberapa tambahan data baru terkait korupsi haji, termasuk juga bantahan menag yang mengatakan tidak ada pemakaian uang DAU sejak mei 2005. Tapi ternyata kami temukan ada pemakaian pada tahun 2005," ujar koordinator divisi pelayanan publik ICW Ade Irawan di gedung KPK.

Menurut Ade, ada beberapa kegiatan menag yang diduga menggunakan DAU. Diantaranya, termasuk acara *open house* saat hari raya Idul Fitri di rumah menteri pada tahun 2005. "Tapi data lengkapnya kita berikan nanti setelah kita lapor ke KPK," jelasnya.

Direncanakan, ICW akan diterima oleh wakil ketua KPK bidang pencegahan M Jasin. Anggota ICW yang turut hadir dalam pertemuan tersebut selain Ade yakni Emerson F yuntho dan Agus Suna.

Sebelumnya ICW sudah melaporkan aliran DAU pada menteri agama ke KPK pada tanggal 26 Desember lalu. Beberapa hal yang dilaporkan adalah tentang penggunaan tunjangan fungsional, tunjangan hari raya dan perjalanan dinas ke luar negeri dari DAU. (Republika)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Presiden, Krisis Global dan Tempat Hiburan Oleh Diah Novianti

Ibarat warga biasa yang menikmati liburan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu 4 Januari 2009 menghabiskan waktu sekitar dua jam di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Presiden pertama kali mengunjungi Pusat Primata Schmutzer untuk mendengarkan penjelasan tentang kehidupan orang utan, lalu dilanjutkan berkeliling kawasan kebun binatang dengan menggunakan mobil berbentuk kereta mini.

Sejak tiba di Ragunan pada pukul 09.00 WIB, Presiden selalu menjadi pusat perhatian pengunjung yang mulai memadati kebun binatang untuk menikmati liburan awal tahun.

Kepala Negara yang mengenakan pakaian batik bernuansa merah marun tampak selalu sumringah dan ceria meladeni pengunjung kebun binatang Ragunan untuk berjabat tangan atau sekedar melambaikan tangan dari jauh.

Setidaknya tiga kali Presiden Yudhoyono berbicara langsung dengan pengunjung Ragunan melalui peneras suara dan mengucapkan selamat berlibur.

Di akhir kunjungannya, Presiden lalu menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kunjungannya ke Ragunan bukan sekedar pelesir seperti warga biasa yang hanya ingin melihat koleksi satwa atau menggelar tikar di rerumputan.

Konferensi pers itu pun unik karena dilakukan bukan hanya di hadapan para wartawan, namun juga di depan para pengunjung Ragunan yang sudah diberi perintah tetap tenang selama Presiden berbicara.

Sebelum Presiden berbicara, salah satu juru bicaranya, Andi Mallarangeng, menyampaikan kepada pengunjung Ragunan bahwa salah satu kegiatan Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat adalah bertemu langsung dengan masyarakat, seperti kunjungan yang dilakukan ke Taman Margasatwa Ragunan.

Setelah Andi berbicara, Ibu Ani pun angkat bicara meraih mikrofon. Ia menyapa pengunjung dan bertanya kapan anak-anak kembali bersekolah setelah liburan akhir tahun. Ia berpesan agar anak-anak menyiapkan diri kembali ke sekolah setelah cukup lama berlibur.

Melihat pergerakan masyarakat

Tiba saatnya Presiden berbicara, ia lalu menjelaskan maksud kunjungannya ke Taman Margasatwa Ragunan.

Selama menjabat Presiden sejak 2004, Kepala Negara mengatakan, Kebun Binatang Ragunan adalah satu-satunya tempat hiburan yang belum pernah ia kunjungi.

Menurut Presiden, setiap tahun ia selalu mendatangi tempat hiburan di Jakarta pada hari raya atau peringatan tahun baru.

"Dari semua tempat, tinggal Taman Ragunan ini yang belum. Ancol sudah, Taman Mini Indonesia Indah sudah," ujarnya.

Namun, kunjungan ke Taman Ragunan kali ini menjadi istimewa bagi Presiden karena dunia sedang dirundung krisis keuangan global.

Presiden mengaku ingin "terjun langsung ke lapangan" untuk melihat dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia, yang salah satu tandanya, menurut Presiden, dapat dibaca melalui jumlah pengunjung tempat-tempat hiburan pada liburan awal tahun.

"Saya ingin melihat keadaan di lapangan, apa betul itu tercermin dari kehidupan masyarakat luas. Salah satu ukuran kehidupan rakyat adalah libur tahun baru ini," ujarnya.

Pada masa liburan akhir tahun, Presiden memantau arus pergerakan masyarakat yang merayakan liburan ke daerah wisata seperti Puncak, Jawa Barat.

Presiden juga mendatangi pusat perbelanjaan Pondok Indah Mall untuk mengetahui kegiatan jual beli masyarakat di saat krisis.

"Saya memonitor banyak yang ke Puncak, berarti ada pergerakan. Saya juga memantau kegiatan di mall-mall, berarti ada perputaran," ujarnya.

Belum cukup melihat fakta kelompok masyarakat tertentu yang tidak kehabisan uang untuk berbelanja dan menghibur diri di tengah krisis, Presiden Yudhoyono juga memaparkan data melonjaknya pengunjung tempat-tempat hiburan di tengah krisis.

Presiden menyampaikan ia telah mendapatkan laporan dari pemimpin tempat hiburan seperti Taman Impian Jaya Ancol bahwa pengunjung akhir 2008 melonjak cukup tinggi menjadi 295 ribu orang dari 260 ribu orang pada tahun lalu.

"Ini berarti ada pergerakan. Mudah-mudahan banyak saudara kita bisa liburan, memiliki pendapatan, sehingga ini cerminan dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Amalkan demokrasi

Setelah memberikan keterangan pers, Presiden lalu menyempatkan diri berbincang sejenak dengan para pengunjung. Presiden bertanya tentang asal daerah mereka dan melontarkan canda kepada salah satu pengunjung asal Pacitan, Jawa Timur, bahwa mereka bertetangga.

Selain untuk mengetahui dampak krisis keuangan global terhadap daya beli masyarakat, Presiden juga mengatakan kunjungannya ke tempat hiburan juga dimaksudkan untuk mengamalkan demokrasi.

"Ada orang mengatakan, dalam demokrasi itu pemimpin jangan hanya membaca bukunya Plato supaya menguasai demokrasi. Setelah membaca sedikit buku Plato, setelah itu harus naik bus agar bisa ketemu rakyat di dalam bus itu," tutur Presiden.

Presiden lalu mengartikan kiasan tersebut sebagai kewajibannya untuk terus bertemu dan berdialog dengan rakyat.

"Khusus hari libur ini, saya menggunakannya untuk bertemu rakyat, menyapa rakyat, sampai saya mendengar apa yang menjadi pikiran mereka," ujarnya.

Diiringi lambaian tangan pengunjung ragunan, Presiden lalu meninggalkan Taman Margasatwa Ragunan. Tidak seperti ucapannya, Presiden pulang menggunakan mobil Mercedes Benz, bukan bus kota.

Yang terdengar di dalam mobil itu hanya deru halus mesin buatan Jerman. Sementara, suara mereka yang khawatir terancam pemutusan kerja dan tak sanggup lagi berlibur tentu hanya terdengar di luar. (Antara)

2. Letter: Indonesian embassy in Dili clarifies by Nelson Simorangkir

The Indonesian Embassy in Dili needs to respond to Greg Harrison's letter (*The Jakarta Post*, Dec. 23. p. 7)

Due to the public holidays (Christmas and New Year) in December, the number of visa applicants had increased tremendously.

However, we tried our best to serve all applicants by providing them with queue number cards, individually or collectively.

During the peak season, people start to queue at 6.30 a.m. For this season, we extended our hours of service starting at 8.30 a.m. to 1 p.m. for document submission and from 2 p.m. to 5 p.m. for document collecting.

Based on the above facts, it was unlikely that you could submit your visa application when you arrived at the embassy at 2 p.m. And you came at 9.30 a.m., when the long queue would have crowded the immigration counter.

You stated you spoke to Maubere security officers, who were posted in front of the immigration counter. (They are not embassy employees.) Unfortunately, they don't speak English, but only Tetum and Indonesian.

The embassy also needs to firmly state that there is no additional unofficial fee for the services we provide. Embassy officers never receive or ask for any unofficial extra fee, not even for a single cent.

Should you need official information, you can call the relevant officials at +670-3317107. This number is posted on the information board. Or you can send a letter via fax to 670-3323684. (The Jakarta Post)

3. Soal Kapal-kapal Eks Jerman (Timur) Itu Oleh Wirasmo Wirote

“...kapal-kapal ini jika dirawat dengan baik, saya rasa masih bisa beroperasi sampai lima belas tahun lagi.”

Kutipan di atas adalah ucapan Laksamana Pertama Freddy Numberi di suatu pagi Mei 1996 di Neustadt, pangkalan AL Jerman. Freddy Numberi saat itu berbicara dengan penulis beberapa hari sebelum penyeberangan Batch-12, yang terdiri dua korvet kelas Parchim eks Jerman Timur ke pangkalannya yang baru di Surabaya. Freddy (sekarang Laksamana Madya Purnawirawan, Menteri Perikanan dan Kelautan), ketika itu adalah Komandan Satgas Proyek Pengadaan Parchim-Frosch-Kondor (Yekda PFK).

Dua belas tahun kemudian (3/12/2008), anggota Komisi I DPR, Djoko Susilo mengatakan, hanya 10 dari 39 kapal-kapal eks Jerman Timur yang dibeli pemerintah pada 1990-an itu yang masih bisa dioperasikan. Bahkan katanya, dalam kunjungan Komisi I ke Surabaya 2003, kedatangan sejumlah kapal hanya digunakan sebagai asrama prajurit.

Djoko Susilo menuntut pemerintah Jerman mengembalikan uang pembelian 39 kapal perang tersebut, termasuk biaya perbaikan dan perawatannya senilai US\$ 560 juta (Rp 6,7 triliun). Sumber lain mengatakan US\$ 480 juta (Majalah Tempo, 11/06/1994). Ia dan kawan-kawan menilai pemerintah Jerman tidak berhak menerima hasil penjualan kapal-kapal itu, antara lain karena kontraknya tidak sesuai mekanisme demokratis dan tanpa persetujuan DPR. Sejumlah pejabat di era Soeharto yang terkait pembelian kapal-kapal tersebut rencananya akan dipanggil untuk memberi penjelasan.

Anggapan Djoko Susilo bahwa kini hanya 10 dari 39 kapal eks Jerman Timur yang masih bisa dioperasikan, terkesan berlebihan dan perlu dipertanyakan dasar data dan faktanya. Kapal-kapal itu ketika dibeli memang bukan baru lagi, dan sempat ditelantarkan oleh pemiliknya yang lama.

Setara Empat Korvet Baru “Sigma”

Kapal-kapal itu terdiri korvet anti-kapal selam kelas Parchim buatan 1981-1985 sebanyak 16 unit, LST kapal pendarat kelas Frosch buatan 1976-1979, 14 unit, dan penyapu ranjau Kondor 9 unit buatan 1971-1973. Sejak proses pembeliannya telah memancing kontroversi tajam. Berbagai media mengatakannya sebagai terlampau usang. Ada yang menyebutnya sebagai rongsokan, dan macam-macam stigma lainnya yang cenderung melecehkan. Namun, ada anggapan armada kapal bekas itu justru “lebih menguntungkan” karena bisa digelar setiap saat dibutuhkan secara serempak ke seluruh wilayah perairan Nusantara. Jangkauan operasionalnya pun luas.

Kendati berupa kapal bekas, setelah dirombak sesuai kebutuhan dan pengoperasiannya kelak di perairan Indonesia, kapal-kapal itu bisa diseberangkan dengan selamat sampai Tanah Air. Kecuali KRI Teluk Lampung (Frosch) yang nahas dihantam badai di Teluk Bascay, Spanyol, kapal-kapal lainnya walaupun juga berada dalam cuaca yang sangat tidak bersahabat di kawasan yang sama, berhasil selamat sampai Tanah Air.

KRI Teluk Lampung bersama KRI Imam Bonjol (korvet Parchim) adalah Batch-4, bertolak dari Jerman pada Mei 1994. Kapal-kapal lainnya (korvet dan Frosch) diseberangkan bertahap mulai November 1993. Batch-1 ini terdiri dua korvet dan satu unit Frosch. Penyeberangan terakhir, Batch-13, terdiri dua korvet diseberangkan pada Juli 1996, sedangkan Kondor, penyapu ranjau, karena ukuran dan bobotnya yang ringan, penyeberangannya dilakukan dengan kapal.

Dari sisi harga, kapal-kapal perang yang dibeli secara borongan itu memang terkesan “murah-meriah”. Bagaimana tidak, 39 unit kapal perang dibeli sekaligus dengan US\$ 560 juta. Harga ini setara dengan hanya empat unit korvet baru kelas Sigma buatan Belanda, yang baru-baru ini dibeli pemerintah (KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, dan KRI Iskandar Muda sudah berdagangan sejak tahun 2006. KRI Frans Kaisepo diharapkan datang pada tahun 2009).

Kondisi Terkini

Bagaimana kondisi kapal-kapal tersebut dewasa ini? Tentang sembilan kapal penyapu ranjau, Kondor memang tak pernah disebut-sebut lagi. Barangkali sebagian dari jenis kapal inilah yang sempat dipergoki Djoko Susilo telah berubah fungsi menjadi asrama prajurit. Pada awalnya, sistem permesinan dan desain kapal-kapal itu lebih untuk operasional di perairan Eropa yang tidak memerlukan pelayaran jarak jauh dan waktu yang lama sehingga tipe mesin seperti yang terpasang sewaktu kapal-kapal itu diseberangkan ke Indonesia, dinilai tidak tepat. Sesampai di Indonesia, dalam waktu lima tahun ke depan ketika mesin kapal-kapal itu sudah waktunya di-“overhaul”, seharusnya diganti dengan mesin baru yang umum digunakan untuk medan perairan di Indonesia. Tetapi program ini tidak semulus yang telah dipetakan karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Akibatnya, pembelian mesin baru terkendala. Pemerintah belum mampu membeli mesin-mesin baru. KSAL (kala itu) Laksamana Bernard Kent Sondakh berharap sebanyak 30 kapal eks Jerman Timur tersebut sudah akan “hidup” kembali pada tahun 2004 (Kompas, 19/09/2002).

Barulah pada 2002 program repowering kapal-kapal eks Jerman Timur itu dimulai. Tahap I, repowering dilakukan atas enam korvet Parchim dan empat LST Frosch. Dilanjutkan dengan sepuluh korvet dan lima Frosch pada 2003, dan berikutnya lima Frosch lagi pada tahun 2004. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR (Juni 2005), KSAL Laksamana Slamet Soebijanto menegaskan kembali dilakukannya repowering secara bertahap atas kapal-kapal tersebut.

Di Komando Armada Kawasan Barat dewasa ini bertugas delapan korvet Parchim eks Jerman Timur. “Di sini (Koarmabar), adalah salah satu andalan saya. Kapal-kapal itu mampu patroli ke Barat Sumatera sampai Natuna...”, ujar Panglima Koarmabar Laksamana Muda Agus Suhartono (kini Asrena Kasal) ketika ditemui di Markas Koarmabar, Februari 2008. Delapan korvet Parchim lainnya kini bertugas di Komando Armada Timur. Komandan Satgas Yekda PFK Freddy Numberi tidaklah berlebihan ketika pada tahun 1996 memprediksi kapal-kapal eks Jerman Timur itu masih mampu dioperasikan sampai lima belas tahun lagi. Bahkan, jika mengacu pada lazimnya kapal dikandangkan pada usia tiga puluh tahun, korvet-korvet itu seharusnya masih mampu bertahan sampai 2015. (Sinar Harapan)

3. Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel? Oleh Mohamad Nabil

Pada detik-detik pergantian tahun 2008 ke 2009, perhatian dunia internasional tertuju ke Jalur Gaza. Konflik akut Israel-Palestina kembali pecah setelah pencapaian kesepakatan mengalami jalan buntu. Hingga hari keempat serangan Israel ke Palestina, korbannya sudah mencapai 2.000-an, yang meninggal dunia sekitar 350 jiwa, luka-luka 1.200 orang, dan dalam keadaan sekarat 800 orang. Sebagian besar korban adalah masyarakat sipil Palestina.

Ada beberapa hal yang memicu Israel dan Palestina melahirkan hasrat perang, baik dalam bentuk serangan roket Hamas ke Israel maupun agresi balik Israel terhadap Palestina. Pertama, persoalan sovereignty (kedaulatan), yaitu pengakuan wilayah kedua pihak. Akarnya bisa dilacak pada awal abad ke-20, yaitu tahun 1930-1948, ketika muncul antisemitisme di Eropa. Xenophobia terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, terutama di Jerman dan Prancis, memaksa mereka untuk membeli tanah di wilayah Palestina. Maka, terjadilah proses pembelian tanah besar-besaran yang belakangan dicaplok menjadi wilayah Israel.

Kedua, otoritarianisme agama. Baik Israel (Yahudi) maupun Palestina (Islam), masing-masing memiliki potensi untuk menganut corak keberagaman yang otoriter. Model keberagaman semacam ini adalah keyakinan dan perasaan bahwa agamanyalah yang paling benar (truth claim). Agama selain yang mereka anut adalah salah dan wajib diperangi. Model keberagaman semacam ini lebih cenderung eksklusif, irasional, emosional, dan intoleran. Sebagian Muslim Palestina menganggap hanya agama Islam-lah yang paling benar. Begitu juga Israel yang mayoritas Yahudi, sebagian besar dari mereka menganggap dirinya adalah “umat terpilih”.

Akumulasi dari rangkaian konflik yang tak berkesudahan ini sekilas tampak sebagai warisan sejarah yang niscaya. Tapi, perlu diingat bahwa praktik keberagaman semacam itu—menyerang, melakukan bom bunuh diri, dan sejenisnya—tidak murni orientasi keagamaan semata, tetapi harus dilihat sebagai anak kandung dari persinggungan ruang-ruang sosial yang ada: politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Bisa saja praktik semacam itu merupakan akumulasi dari keinginan-keinginan yang tak terungkap dan tidak memiliki tempat dalam ruang sosial.

Mencari jalan keluar dari konflik akut ini memang membutuhkan kesabaran dan kebesaran jiwa, mengingat berbagai ikhtiar perundingan perdamaian sebelumnya selalu mengalami kegagalan. Dalam konteks itu, sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa memberikan peran yang signifikan dalam mengurangi konflik antara Israel dan Palestina.

Harapan akan peran tersebut bukan hanya disuarakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, melainkan juga ahli-ahli strategi internasional yang meyakini bahwa Indonesia bisa memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik (Timur Tengah) dan menata kehidupan (peradaban) dunia yang lebih setara dan berkeadilan.

Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara penganut Islam moderat seharusnya dapat mewakili umat Islam di dunia untuk terus melakukan negosiasi terhadap Israel.

Meski demikian, ada keterbatasan peranan Indonesia dalam mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selama ini Indonesia hanya bisa berperan melalui bantuan kemanusiaan baik yang bersifat formal, dari pemerintah ke pemerintah, maupun yang tidak formal, dari civil society ke civil society. Dengan kata lain, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika hendak melakukan negosiasi kepada kedua pihak.

Perlu diketahui bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan berarti Indonesia akan mengiakan atau mendukung Israel dalam menjajah Palestina. Justru dengan begitu, Indonesia bisa memainkan peran (visi) perdamaian dengan membuka perundingan kepada kedua pihak. Selama ini Indonesia hanya memainkan peran perdamaian melalui lembaga-lembaga internasional seperti ASEAN, organisasi negara-negara Islam (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan, peranan itu tampaknya tidak terlalu kelihatan karena Indonesia bukanlah negara "kuat" baik dari segi ekonomi, militer, maupun kondisi sosial-politik dalam negeri.

Oleh karena itu, setidaknya ada dua peran vital yang bisa dimainkan Indonesia jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, dengan membuka hubungan diplomatik, komunikasi Republik Indonesia (RI) dengan Israel akan lebih terbuka lebar.

Lebih dari itu, Indonesia juga bisa mengajak kekuatan-kekuatan lainnya, seperti negara-negara Arab, Asia Tenggara, dan Afrika, untuk mendukung dan memprakarsai tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Kerja sama negara-negara itu, di samping menjadi mediator untuk meletakkan dasar-dasar pemulihan konflik antara Israel dan Palestina, juga harus diarahkan pada penguatan (internal) pemerintahan Palestina dengan mendukung dan membantu pembangunan ekonomi mereka, rekonsiliasi faksi-faksi di internal Palestina, dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain.

Kedua, peluang untuk melindungi rakyat Palestina pun akan lebih kuat dan terbuka serta masif jika RI membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab, jika suatu saat, misalnya, Israel tiba-tiba menyerang Palestina, Indonesia bisa menggunakan perannya dengan mengingatkan dan menegur langsung Israel bahwa mereka tidak bisa bertindak semena-mena.

Dengan kata lain, Indonesia bisa membujuk Israel untuk tidak bertindak brutal kepada Palestina walaupun negosiasi kesepakatan perdamaian mengalami kebuntuan. Lebih dari itu, Indonesia bisa meminta ketulusan negara-negara kuartet Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB untuk menghakimi secara adil dan memberi jalan keluar bagi terciptanya negara Palestina dan Israel yang berdaulat, damai, dan makmur.

Jika Pemerintah Indonesia bisa memainkan peranan itu, berarti bangsa Indonesia akan memberi jalan alternatif dalam mencari dan menemukan kesepakatan damai untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina. Dan, jika hal itu terwujud, Israel dan Palestina ke depan akan menemukan bahasa rekonsiliasi, bahasa perdamaian dan kerja sama, kendati akan tetap menjadi sesuatu yang sangat berat dan sulit. Sebab, hanya dengan pencarian metode-metode alternatif yang seperti itulah Indonesia bisa mengubah ketidakmungkinan (kesepakatan damai Israel-Palestina) menjadi mungkin. (Suara Karya)

1. Bantarto Bandoro: Sikap AS Lahirkan Radikalisme Baru Penulis: Mario Aristo

Sikap Amerika Serikat yang merestui serangan Israel ke Jalur Gaza akan melahirkan radikalisme baru. Sikap AS itu tidak akan berhenti pada George W Bush yang sebentar lagi akan lengser dari jabatan presiden negara adidaya itu, tapi penggantinya, Barack Obama, akan bersikap sama.

Demikian pandangan Pengamat Internasional dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) **Bantarto Bandoro** ketika dihubungi **Mario Aristo** dari *Mediaindonesia.com*, kemarin.

"Tidak akan ada perubahan besar yang dilakukan Obama karena Israel adalah teman lama Amerika. Dari sikap AS itu, akan lahir radikalisme yang bisa muncul di mana saja," ujarnya.

Mengenai sikap Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tumpul dalam menghadapi agresi negeri Zionis yang membabi buta, pengajar hubungan internasional dari Universitas Indonesia itu mengatakan hal tersebut tak lepas dari faktor sejarah. "AS sangat berperan dalam melahirkan PBB. Selain itu, AS merasa sebagai negara *superpower* yang mempunyai hak istimewa terhadap berbagai keputusan," ungkapnya. Berikut petikan wawancara selengkapnya:

PBB terlihat mandul menghadapi agresi Israel ke Jalur Gaza. Ada yang mengatakan karena PBB juga memiliki ketergantungan yang tinggi ke AS, pendanaan operasional PBB kabarnya dari AS juga. Komentar Anda?

Memang benar belum terlihat kiprah PBB yang signifikan dalam menghadapi serangan Israel terhadap Hamas akhir-akhir ini. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh AS yang sangat dominan. Belum lagi ditambah faktor kepentingan pemerintah AS di wilayah Arab. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja PBB. Saya rasa bukan pada masalah pendanaan operasional PBB yang juga didominasi AS, namun lebih dari itu. Ada kepentingan yang lebih besar dalam masalah ini.

Mengapa bisa seperti itu?

Yang utama, kita tak bisa lepas dari sejarah, bagaimana AS sangat berperan dalam lahirnya organisasi PBB. Selain itu, AS juga merasakan dirinya sebagai negara besar yang super-power. AS sendiri merasa dirinya mempunyai hak istimewa terhadap berbagai keputusan.

Kalau AS meminta Israel menghentikan serangan, apakah akan dipatuhi Israel?

Dengan keberadaannya diantara anggota-anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, AS tetap memiliki pengaruh yang dominan. Saya rasa apapun akan dilakukan pemerintah AS apabila sudah mengancam pemerintahan AS. Bahkan bukan tidak mungkin apabila dikatakan Israel akan menghentikan serangan apabila AS memintanya secara langsung.

Bahkan dapat dikatakan seluruh usul yang telah disuarakan forum, termasuk di Dewan Keamanan PBB, tetap saja tidak akan disetujui tanpa persetujuan AS. Inilah yang membuat seakan PBB adalah sandera kepentingan AS.

Yang dilakukan oleh negara-negara lain yang juga anggota dewan keamanan PBB hingga saat ini barulah sekedar menghasilkan wacana-wacana, bahwa pada prinsipnya mereka menentang berbagai tindakan kekerasan, termasuk di Gaza. Namun Dewan Keamanan PBB belum mempunyai suara yang tegas dan nyata dalam menyikapi serangan Israel di wilayah Gaza. Mereka masih menunggu perkembangan yang terjadi di Gaza.

Apakah nantinya Obama akan melakukan perubahan dalam kebijakan AS terhadap konflik Israel-Hamas?

Saya pesimis. Saya rasa tidak akan ada perubahan besar yang dilakukan Obama nanti. Saya rasa masih akan tidak jauh dari apa yang dilakukan Bush. Obama masih akan menggunakan dasar berpijak yang sama untuk mendukung Israel.

Hal ini diantaranya dipengaruhi karena Israel adalah teman lama Amerika. Dan dari sikap AS ini, tidak menutup kemungkinan bermunculan berbagai sikap radikalisme. Radikalisme tersebut sangat mungkin untuk bermunculan di mana saja.

Bagaimana dengan Liga Arab, yang seakan tidak mempunyai peran dalam konflik Israel-Hamas?

Saya rasa hal ini dikarenakan terdapatnya silang pendapat di dalam tubuh Liga Arab itu sendiri. Silang pendapat itu paling buruknya dapat menyebabkan perpecahan pada Liga Arab. Dengan kondisinya yang sedang tidak satu suara, Liga Arab seakan tidak mempunyai lagi daya untuk mengatasi konflik Israel-Hamas yang tak kunjung selesai.

Mengenai konflik Israel-Hamas, apakah ada faktor ideology Zionisme Yahudi di dalamnya?

Ya betul. Terdapat ideologi Zionisme Yahudi yang mendasari Israel untuk terus menyerang Hamas agar keluar dari Gaza. Hal ini mendasari tindakan Israel yang bertujuan menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayahnya.

Apa pendapat anda mengenai sikap Prancis yang berani mengecam tindakan Israel?

Menurut saya memang apa yang dilakukan Prancis berbeda sendiri dari yang dilakukan negara-negara Eropa pada umumnya. Hal ini dikarenakan Prancis berani mengambil tindakan yang nyata, menyuarakan sikapnya mengecam tindakan agresi Israel di wilayah Gaza. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi Prancis diantara negara-negara Eropa di mata dunia. (Media Indonesia)

V. EDITORIAL :

1. Editorial: Respecting people's choices

The Constitutional Court's ruling on the distribution of legislative seats late last month deserves applause, as it basically curbs the power of the party system and instead allows for the clear articulation of the voices of voters, the people. But when it comes to implementation, the ruling may create problems.

With Law No. 10/2008 on legislative elections, the court has ruled that seats in the nation's legislatures will go to the candidates who secure the most votes in the election. It therefore nullifies article 214 of a 2008 law which granted political party leaders the authority to unilaterally hand-pick their close supporters as party representatives in national and regional legislatures.

The Court's ruling, though democratic in nature, is not enough to make the upcoming elections a true feast of democracy. The ruling could potentially create problems because it does not consider the 2.5 percent national eligibility threshold required for a political party to be represented in the legislature.

Thus, if a candidate wins the most votes in one district, it is not yet certain if he/she would get the seat at the legislature, especially if his/her party fails to collect the necessary 2.5 percent of votes.

The court's ruling also goes against the spirit of giving women a greater role in politics. It runs counter to article 55 of the same law that the Constitutional Court has examined (Law No. 10/2008), which stipulates that at least one in every three legislative candidates nominated by each political party must be a woman.

Some parties have deliberately put women candidates high on their ballots in the hope that they will win seats. But, with the court's ruling, the placing of female candidates at the top of lists is no longer relevant.

No wonder women's rights activists are furious with the ruling, saying that it negates their long struggle for a 30-percent quota of women in legislatures.

Furthermore, the court's ruling seems to mean that the upcoming election will work using the district system, while the basic laws of the upcoming election system are in fact a combination of both the district and proportional system.

Thus, without recognizing the spirit of the election laws, the Constitutional Court's decision is a mere disruption to the heating-up election process. This creates complications for the General Elections Commission (KPU), as it carries a number of technical problems. Up until now, for example, the KPU and party contestants differed on how the balloting system should work, namely, whether voters should be allowed to choose both a political party and a candidate. As the April 2009 legislative election is fast approaching, the KPU needs to tackle these basic and technical problems with haste. There is a plan by the President to issue government regulations in lieu of the law (Perpu), in order to cover the technical loopholes following the issuance of the court's ruling.

As the ruling is binding in nature, it is suggested that the Constitutional Court revoke other contradictory articles in each of the three political laws -- Law No. 2/2008 on political parties, Law No. 10/2008 on the legislative election and Law No. 42/2008 on the presidential and vice presidential election.

Articles that should be revoked include article 16 (1d) of the political party law, which grants every political party the right to "recall" any of its members from the legislature if he/she goes against the party's lines. As legislators are determined by the number of votes they receive, not by their number on the list set by the party, giving the parties the right to recall cadres from the parliament becomes irrelevant.

If this is not possible because of time constraints then the government and KPU must work harder to ensure that the implementation of the court's ruling does not create problems in the future and will not hinder the preparation process for the elections.

In the longer term, the government and the future House of Representatives -- that results from the upcoming elections -- should think of the ways to make our democracy work better, including through better election processes -- be they a combination of district and proportional system or a pure district system.

The most important thing is to make the voters, the people, and not the political parties the true deciders of the elections. As a result, our legislators would truly represent the people and not their parties. (The Jakarta Post)

2. Anggota DPR Tetap Merawat Kemalasan

Pemilu sebentar lagi, namun ada satu daftar yang tiada kunjung berkurang. Bahkan bertambah panjang. Itulah daftar tabiat buruk anggota DPR. Adalah bukan fakta baru ruang sidang hanya berisi deretan kursi kosong melompong. Adalah pula bukan perkara luar biasa pengesahan undang-undang ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Tak hanya itu. Anggota DPR menjadi autistik dan asyik dengan dirinya sendiri. Mereka tak peduli dengan desakan agar menghentikan pelesiran ke luar negeri atas biaya negara. Bahkan, tak sedikit yang berlaku bak preman. Memeras mitra kerja sebagai imbalan meloloskan suatu kebijakan atau RUU. Di saat lain mereka berubah menjadi calo. Kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Riau, dan Tanjung Api-Api, Sumatra Selatan, serta aliran dana Bank Indonesia adalah contoh nyata perilaku anggota dewan yang miring. Kasus-kasus itu sedang disidangkan.

Tabiat buruk itu tidak sebanding dengan setumpuk fasilitas yang diterima anggota DPR. Selain uang kehormatan ditingkatkan, anggota DPR mengarang aneka tunjangan untuk mereka. Misalnya tunjangan komunikasi intensif, tunjangan listrik dan telepon, dan biaya perjalanan ke daerah pemilihan. Juga masih banyak fasilitas lain.

Setiap anggota DPR kini dibantu satu tenaga ahli. Adapun Badan Legislasi diperkuat 30 tenaga ahli. Paling kurang 580 tenaga ahli berkumpul di Senayan. Tapi kualitas produk undang-undang tetap saja rawan untuk ditinjau ulang di Mahkamah Konstitusi. Semua fasilitas wah itu ternyata tidak juga mengubah perangai buruk anggota dewan. Mereka tetap saja merawat kemalasan. Tidak ada upaya nyata dari pimpinan DPR, pimpinan fraksi, ataupun pimpinan komisi untuk memperbaiki citra parlemen.

Memang muncul niat agar anggota DPR yang malas diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun, gagasan itu ditentang. Muncul resistensi dengan berbagai alasan.

Alasan yang pertama anggota DPR bukanlah pegawai yang harus selalu ada di kantor. Mereka memiliki konstituen yang harus ditemui. Alasan yang mengada-ada. Sebab bukankah DPR punya masa reses, yang dipakai untuk mengunjungi daerah pemilihan?

Alasan lain menyangkut kewenangan. Siapa yang berwenang mengumumkan nama anggota dewan yang malas itu? Badan Kehormatan? Fraksi? Sekjen atau pimpinan DPR? Semuanya saling melempar dan merasa tidak berhak.

Intinya tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki citra DPR. Malah sebaliknya, beramai-ramai membenamkannya.

Karena itu, masyarakat harus memberi sanksi sosial dengan memperlakukan anggota dewan yang malas itu. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu lebih aktif menghimpun data secara akurat dan memublikasikan nama dan fraksi anggota DPR yang malas. Hukuman seperti itu mestinya membuat anggota dewan berubah tabiat. Apalagi di masa depan, terpilihnya seorang calon legislatif ditentukan suara terbanyak. Berarti pertanggungjawaban individual harus lebih serius.

Sikap malas anggota DPR menyangkut moralitas. Sikap pemalas sebenarnya bertentangan dengan asumsi dasar bahwa anggota dewan adalah orang-orang terhormat dan terpadang.

Sekarang DPR sedang membahas RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU itu seharusnya diatur dengan tegas dan jelas kewenangan siapa untuk mengumumkan anggota DPR yang malas.

Itu kalau ingin DPR hasil Pemilu 2009 menjadi lebih baik. (Media Indonesia)

Jakarta, 6 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu